

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Permasalahan sampah di Indonesia ikut berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Permasalahan sampah tersebut meliputi jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat, Tempat Pembuangan Akhir yang belum memenuhi kebutuhan dan juga kesadaran masyarakatnya akan pentingnya 3R yakni *reuse*, *reduce* dan *recycle*. Dalam penanganannya di Indonesia sendiri sudah memiliki Undang – Undang yang mengatur tentang sistem pengelolaan sampah untuk menyelesaikan masalah sampah yang ada, yaitu UU No. 18 Tahun 2008. UU tersebut dijadikan acuan dalam membuat JAKSTRANAS atau Kebijakan dan Strategi Nasional. Salah satu daerah provinsi di Indonesia yang masih memiliki masalah dengan sampah adalah Jawa Barat.

Dalam mengatasinya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah berupaya membuat Kebijakan dan Strategi Daerah atau JAKSTRADA dengan membuat Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 12 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui menjadi Perda No. 1 Tahun 2016. Artinya, antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi sudah menemukan titik seimbang dalam mengatasi permasalahan sampah. Namun nyatanya permasalahan sampah masih ada. Ditambah lagi dengan upaya Pemda Provinsi Jawa Barat yang hanya menggelontorkan 0,05 persen atau sekitar 17,7 milyar rupiah untuk pengelolaan sampah. Permasalahan sampah tersebut akan tetap ada mengingat jumlah pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang meningkat membuat produksi sampah ikut meningkat. Dari data yang didapat oleh penulis, sampah di Jawa Barat pada 2018 didominasi oleh sampah organik. Sampah organik sendiri merupakan sampah dapur, sisa makan dan kebanyakan dari sampah rumah tangga. Maka dari itu pola konsumsi masyarakat sangat mempengaruhi jumlah timbulan sampah.

Ditambah dengan permasalahan sampah terkait dengan Tempat Pembuangan Akhir atau TPA di Jawa Barat. Perda Provinsi Jawa Barat pasal 22

ayat 7 mengenai upaya Pemda Provinsi Jawa Barat bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode ramah lingkungan diantaranya yaitu dengan pengurugan lahan atau yang disebut *sanitary landfills*. Dalam membuat TPA *sanitary landfills* dibutuhkan dana yang besar, sementara anggaran untuk sampah di Jawa Barat hanya 17,7 milyar rupiah (0,05 persen) dari anggaran daerahnya. Dengan data yang didapat dan sudah dijabarkan oleh penulis, bahwa dari 18 TPA di Jawa Barat, hanya 6 saja yang sudah menggunakan teknologi *sanitary landfills*, jumlah tersebut kurang dari setengah jumlah TPA yang ada.

Usaha dari Pemda Provinsi dalam menyelesaikan masalah sampah sudah mengikti anjuran dari JAKSTRANAS. Namun nyatanya, upaya tersebut tidak cukup untuk mengatasi permasalahan sampah di Jawa Barat. Dalam mengatasi masalah tersebut, Pemda Jawa Barat membutuhkan inovasi dari sisi teknologi maupun sumber daya manusianya dan dana. Setelah upaya dari Pemda Provinsi Jawa Barat yang masih belum menemui titik terang dalam mengatasi permasalahan sampah, terlahirlah lagi dengan permasalahan TPA di Jawa Barat. Pemerintah Indonesia berupaya melakukan kerjasama bilateral dengan Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Kegiatan JICA dalam *waste management* sudah ada pada tahun 2002 di Jakarta. Sehingga dalam kerjasama ini JICA tidak memiliki permasalahan dalam menjalankannya. Melalui Kementerian LHK dan BAPPENAS maka diajukan kerjasama ini untuk membantu mengurangi permasalahan sampah di Jawa Barat.

Kerjasama bilateral ini akhirnya dilakukan dalam bentuk kerjasama teknis dan juga pinjaman luar negeri. Proses kerjasama ini berlangsung hanya dalam kurun waktu satu tahun. Pemda Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan JICA dalam bentuk kerjasama teknis yakni dalam prosedur AMDAL, perancangan pembangunan TPA Legok Nangka dan Nambo, dan juga perencanaan *Project Private Partnership* (PPP). Tujuan kerjasama prosedur AMDAL yaitu JICA melakukan survei terkait dengan kondisi lingkungan di sekitar daerah pembangunan kedua TPA, mulai dari kualitas air sungai disekitarnya dari tahun ke tahun, lalu infrastruktur di sekitarnya, polusi, serta jumlah sampah di sekitar daerah pembangunan kedua TPA. Setelah melakukan prosedur AMDAL, JICA

merancang pembangunan kedua TPA tersebut dengan kebutuhan yang memenuhi standar. Dalam PPP JICA membantu Pemda Provinsi Jawa Barat dengan stdi mengenai aspek – aspek ekonomi di Jawa Barat, kondisi keuangan di Pemda Provinsi Jawa Barat, sehingga akan lebih memudahkan Pemda dalam menemukan investor.

Ketiga poin kerjasama tersebut dilakukan dengan studi dan survey dalam bentuk bantuan teknis. JICA menuangkan ide – ide nya dalam ketiga poin kerjasama tersebut. Tetapi dalam pinjaman luar negeri untuk proyek ini mendapat hambatan karena biaya yang dibutuhkan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat sangat besar sehingga JICA tidak dapat mewujudkannya. Untuk menggantikan pinjaman luar negeri yang gagal, JICA juga menggantinya dengan perancangan PPP. Harapan yang semula kerjasama ini dapat lancar tetapi pada kenyataannya tidak khususnya dalam pinjaman luar negeri. Sehingga Pemda Jawa Barat harus melakukan skema PPP tanpa JICA untuk mencari dana dalam pembangunan kedua TPA tersebut.

Lepas dari kerjasama tersebut, saat ini TPA di Nambo rencananya akan dioperasikan pada Juli 2020, untuk TPA Legok Nangka sendiri masih mencari investor sehingga pada 2022 nanti TPA tersebut bisa beroperasi. Karena kedua TPA tersebut sudah memiliki konsep yang sangat baik yang dapat mengurangi permasalahan sampah di Jawa Barat. Terlebih lagi kedua TPA tersebut merupakan TPA regional yang akan mengangkat dan mengolah sampah dari beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat.

## **6. 2. Saran**

Keterlibatan JICA dalam kerjasama ini seharusnya lebih dari sekedar kerjasama teknis dalam bentuk study dan survey saja. Sehingga JICA dapat mengikuti implementasi dari hasil rancangannya. Karena seperti yang diketahui bahwa Jepang memiliki teknologi yang sangat canggih, ditambah Sumber Daya Manusianya sangat memadai. Jika memang tidak bisa memberikan ruang keterlibatan lebih untuk JICA, maka akan lebih baik jika kerjasama ini dilakukan pula dalam pelatihan tenaga teknis untuk Indonesia. Karena banyak atau sedikitnya ilmu yang didapat akan membuat SDM Indonesia ikut berkembang. Selanjutnya

mengenai pinjaman luar negeri yang terhambat, jika JICA memberika pinjaman tersebut maka Indonesia tidak perlu mencari investor, karena mencari investor untuk sebuah proyek sangatlah susah. Untuk Pemerintah Indonesia khususnya Pemda Provinsi Jawa Barat agar cepat menyelesaikan proses pembangunan kedua TPA tersebut, khususnya di Legok Nangka yang sampai saat ini masih mencari investor.